

# PERUBAHAN SOSIAL KEHIDUPAN PEREMPUAN SEKS KOMERSIL PRA DAN PASCA PENUTUPAN LOKALISASI DI KEBOBANG, MALANG

Nur Afni Khafsoh, S.Sos.I., M.Sos  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
\*) nur.khafsoh@uin-suka.ac.id

## ABSTRAK

Penutupan lokalisasi di sejumlah tempat di Jawa Timur melahirkan perubahan, termasuk lokalisasi Kebobang di Kecamatan Malang. Perubahan terjadi pada bidang sosial, budaya, ekonomi dan struktur masyarakat lokalisasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, dengan menyajikan gambaran fenomena penutupan lokalisasi dan perubahan sosial, yang terjadi sebelum penutupan lokalisasi dan setelahnya. Hasil penelitian ini adalah meski penutupan sudah dilakukan pemerintah, praktik prostitusi masih dijalankan meskipun tidak secara terang-terangan. Tiga bidang yang paling mengalami perubahan adalah bidang ekonomi, kesehatan serta keamanan yang dirasakan langsung warga lokalisasi, meliputi perempuan seks komersil, mucikari, pedagang, dan penyedia jasa lainnya.

*Kata Kunci: Perubahan sosial, praktik prostitusi, lokalisasi*

### A. Pendahuluan

Penutupan lokalisasi menjadi sebuah fenomena sosial yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, terutama masyarakat yang mengandalkan kehidupan secara finansial dari adanya lokalisasi. Banyak pihak merasa dirugikan atas penutupan lokalisasi, yang tentunya mematikan usaha masyarakat yang telah menjadi mata pencaharian selama bertahun-tahun. Pihak-pihak yang bergantung pada lokalisasi bukan hanya pelaku inti dari bisnis prostitusi seperti halnya mucikari dan perempuan pekerja seks komersil, namun juga usaha-usaha yang mendukung mobilitas ekonomi di kawasan lokalisasi seperti tukang parkir, pemilik wisma hingga pengusaha jasa cuci baju dan lain sebagainya.

Penutupan lokalisasi tentunya tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pemerintah perlu melakukan beberapa rangkaian program yang bertujuan untuk menghindari adanya perlawanan yang berlebihan dari masyarakat lokalisasi. Seperti halnya adanya pemberitahuan, sosialisasi hingga pada pendekatan secara kultural. Hal ini penting dilakukan mengingat penutupan lokalisasi bukan hanya sekedar menutup tempat, namun juga mencoba merubah budaya, tatanan sosial dan habitus pada struktur sosial yang baru.

Penutupan secara simbolik dilakukan pada 24 November 2014 di Kabupaten Malang (Wisadirana & Hakim, 2015). Masih menurut sumber yang sama, Di Kebobang yang salah satu lokalisasi di Kabupaten Malang yang

ditutup terdapat sekitar 52 Wanita Tuna Susila yang menetap dikawasan lokalisasi sedangkan sekitar 20 orang berasal dari lokalisasi Kebobang namun melakukan praktik prostitusi diluar lokalisasi Kebobang.

Penutupan lokalisasi ini menjadi sorotan media-media nasional seperti halnya Kompas, BBC, Liputan 6, VOA dan beberapa portal berita lainnya. Berita yang diangkat oleh media berkisar pada sosialisasi penutupan lokalisasi, prosesi secara simbolik penutupan lokalisasi hingga pada resistensi yang terjadi pada masyarakat terutama masyarakat terdampak penutupan terhadap pemerintah. Namun yang pasti, dengan adanya media yang memuat berita penutupan lokalisasi menjadikan isu penutupan lokalisasi menghangat di tataran masyarakat luas. Perhatian masyarakat Indonesia tertuju pada Jawa Timur yang sedang “Bersih-Bersih” dari kawasan prostitusi.

Kewajiban yang ditanggung oleh pemerintah dengan ditetapkannya kebijakan penutupan lokalisasi adalah pemberdayaan terhadap masyarakat terdampak lokalisasi. Tentunya bukan hal mudah dalam program pemberdayaan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang akan diberdayakan belum tentu menerima keputusan pemerintah secara sukarela. Ada banyak tuntutan masyarakat hingga perlawanan terhadap kebijakan pemerintah ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga dalam prosesnya membutuhkan perencanaan yang matang, waktu yang lama dan

kerja keras demi lancarnya program pemberdayaan.

Tulisan ini menyorot pada penutupan lokalisasi di Kebobang, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang terjadi pada tahun 2014 dengan perencanaan selama sekitar 4 tahun dalam melakukan proses-proses pra penutupan lokalisasi dan 4 tahun pasca penutupan lokalisasi dengan strategi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kepada para terdampak penutupan lokalisasi. Analisis dari perubahan fenomena sosial inilah yang disajikan dalam tulisan ini.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Fenomena penutupan lokalisasi menjadi isu yang ramai diperbincangkan di masyarakat Indonesia karena Jawa Timur memiliki salah satu tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara bernama Dolly. Sehingga penutupan lokalisasi Dolly yang diikuti oleh beberapa lokasi prostitusi lain di Jawa Timur menjadi salah satu berita yang menyita perhatian banyak masyarakat Indonesia.

Salah satunya penelitian yang berjudul Dolly Riwayatmu Kini (Handayani, 2014). Penelitian ini fokus pada sejarah terbentuknya lokalisasi Dolly yang berjalan selama puluhan tahun di Surabaya. Kisah awal muasal dan tokoh bernama Madam Dolly yang merupakan orang Belanda yang menjadi pelopor adanya lokalisasi di kawasan tersebut. Tulisan ini lalu runtut menjelaskan secara detail mengenai perubahan yang terjadi selama kurun waktu

yang lama dan perubahan yang terjadi pada lokalisasi Dolly dari tahun ke tahun. Dari sinilah lokalisasi Dolly mulai terbentuknya sistem sosial lokalisasi Dolly yang massif dan menjadi sebuah entitas yang tidak terpisahkan dari warga kawasan lokalisasi Dolly.

Selain itu, dalam tulisannya Handayani menjelaskan dengan pemerintah Surabaya yang sebelum penutupan memang menjadi sumber pendapatan daerah yang besar. Ada perdebatan yang kuat untuk melakukan penutupan pada lokalisasi Dolly. Di lain sisi selama ini Dolly telah menyumbangkan banyak pendapatan bagi Pemerintah Surabaya, namun di lain sisi juga menjadi citra buruk bagi masyarakat Surabaya beserta dampak-dampak negatif yang dirasakan bagi masyarakat. Sehingga perdebatan ini terjadi cukup lama dan akhirnya membuahkan niat serius pemerintah Surabaya untuk melakukan penutupan lokalisasi. Hal yang penting dari tulisan ini bahwa ada tarik ulur dan proses yang panjang dalam proses sosialisasi hingga hari penutupan serta program penanggulangan pasca penutupan yang ditempuh oleh Pemerintah Surabaya. Betapa lama proses penutupan yang dijalani sama seperti lamanya proses terbentuknya tatanan sosial yang terjadi lokalisasi Dolly. Jelasnya, Program ini tidak bisa instan,.

Tulisan ini memiliki kekuatan pada detail dalam menjabarkan kronologinya dan analisis dalam melihat struktur sosial secara nyata, hanya saja perubahan yang dialami tidak begitu nampak dari Dolly yang sebelum dan

sesudah penutupan lokalisasi. Sehingga perlu adanya pandangan dari penelitian dengan perspektif lain seperti penelitian di tempat lain yang memiliki karakteristik yang berbeda. Jika di Dolly yang merupakan sebuah kawasan lokalisasi yang Besar dan memiliki kompleksitas yang rumit akan berbeda dengan lokalisasi yang dekat dengan kawasan pedesaan dengan karakteristik masyarakat yang berbeda.

Lain halnya dengan penelitian Pardamean Daulay yang berjudul *Post-Closure Prostitution and The Adaptation Strategy of Sex Workers: Case Study of Dolly Prostitution Community, Surabaya Indonesia* (Daulay, 2018). Tulisannya fokus dalam beberapa hal seperti halnya mengenai cara masyarakat bereaksi terhadap ketetapan pemerintah untuk menutup lokalisasi. Resistensi besar-besaran yang dilakukan warga menjadi perlawanan masal dan massif. Dalam tulisannya, Daulay menjelaskan secara rinci pokok-pokok tuntutan masyarakat yang menolak penutupan lokalisasi. Hanya saja, penelitiannya bukan berfokus pada resistensi masyarakat terdampak lokalisasi, namun lebih kepada adaptasi masyarakat untuk bertahan hidup pasca penutupan lokalisasi. bentuk adaptasi dapat dilihat dari pembangunan inovasi baru masyarakat secara ekonomi. Namun inovasi ini bukan hanya adaptasi positif masyarakat melalui program pemberdayaan yang diberikan pemerintah, namun juga dengan mengantisipasi dampak penutupan seperti melakukan transaksi secara online dan di luar kawasan lokalisasi. Hal ini

dilakukan karena pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) rutin melakukan patroli di kawasan lokalisasi Dolly selepas penutupan lokalisasi diberlakukan.

Di samping itu, ada juga adaptasi yang dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan bantuan pemerintah dengan aktif mengikuti program pemberdayaan dan juga mendapat pendampingan usaha. Tidak semua masyarakat dapat mengikuti program ini, karena programnya dibedakan berdasarkan zonasi dari yang paling terdampak, terdampak dan kurang terdampak. Faktanya tidak sedikit juga masyarakat yang berganti pekerjaan baik pekerjaan yang sesuai maupun tidak dengan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Dari penelitian ini peneliti mendapat banyak gambaran mengenai perubahan yang terjadi di lokalisasi. Hanya saja, karakteristik lokasi perkotaan besar yang menjadi lokasi penelitian ini berbeda dengan apa yang akan ditulis. Secara struktur sosial dan perkotaan tentunya berbeda karena tipikal masyarakat pedesaan masih sangat mengemban nilai dan norma masyarakat dengan masyarakat yang cenderung homogeny, sedangkan di perkotaan merupakan kawasan yang rumit dan cenderung heterogen sehingga pendekatan penelitiannya pun berbeda.

Kedua penelitian mengenai penutupan lokalisasi di Jawa Timur yang menjadi literatur di atas tentunya memiliki subyek yang berbeda dalam memandang lokalisasi. Jika pandangan pertama lebih ingin melihat perubahan yang

terjadi dengan pendekatan sejarah dan runtutan peristiwa, maka penelitian kedua ingin melihat proses masyarakat lokalisasi beradaptasi pasca penutupan lokalisasi dengan berbagai bentuk adaptasi. Kedua penelitianitu juga menyoroti pada masyarakat terdampak yang tidak spesifik mengklasifikasin obyek penelitian seperti fokus pada Pekerja Seks Komersil saja atau komunitas terdampak penutupan lokalisasi lainnya. Sehingga penulis merasa penting untuk melihat perubahan yang terjadi di lokalisasi dengan topografi di pedesaan dengan tatanan sosial yang berbeda dengan lokalisasi yang berada di perkotaan. Fokus penelitian terletak pada perubahan yang dialami oleh Perempuan Seks Komersial dan masyarakat sekitar lokalisasi sebelum dan sesudah penutupan lokalisasi.

Pendekatan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan pendekatan Fenomenologis dengan menggunakan teori habitus dari Pierre Bourdieu sebagai pisau analisisnya. Dengan melakukan wawancara yang mendalam pada Perempuan seks komersil, masyarakat dan lembagayang menangani hal tersebut sebagai informasi untuk dianalisis.

Teori pendukung yang digunakan lainnya adalah teori Hierarki Kebutuhan dari Abraham Maslow yang membagi kebutuhan menjadi 5 tingkat yaitu: (Kenrick, Griskevicius, Neuberg, & Schaller, 2010)

- a. Fisiologi: makanan, minuman, tidur, pakaian, dll
- b. Rasa aman: keamanan, keteraturan, stabilita, dll

- c. Sosial : afeksi, relasi, keluarga, dll
- d. Penghargaan : pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dll
- e. Aktualisasi diri : pengembangan diri, pemenuhan ideology, dll

Dari 5 tingkatan itulah dapat menjelaskan tingkat kebutuhan apa saja yang sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi. Hal ini relevan mengingat kehidupan PSK tentunya berubah seiring dengan penentuan lokasi dan memberikan perubahan yang signifikan.

### C. Metodologi

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, artinya bahwa penelitian ini menyajikan gambaran fenomena atau kejadian di lapangan dan dijelaskan apa adanya. Penelitian ini juga menitikberatkan pada kerja lapangan untuk bersinggungan dengan Wanita Seks Komersil. Penentuan informan dilakukan untuk menunjang informasi yang didapatkan, Metode penentuan informan yang dilakukan dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Informan adalah para masyarakat lokalitas dari PSK, Mucikari hingga Pedagang. Penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

### D. Struktur Sosial Lokalisasi Kebobang

Secara demografi desa Kebobang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wilayah ini meskipun dekat dengan ibu kota Kabupaten masih memiliki kontur wilayah

pedesaan. Perlu di Ketahui bahwa Kabupaten Malang berdampingan dengan Kota Malang. Kawasan Kebobang merupakan kawasan pedesaan dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Sehingga kawasan lokalisasi Kebobang memiliki tipikal lokalisasi di pedesaan dengan gambaran karakteristik yang khas.

Keberadaan lokalisasi Kebobang memiliki sejarah yang panjang. Diawali dengan maraknyawarung remang-remang yang ada di daerah Kebobang, Sehingga Pemerintah Desa Kebobang berinisiatif untuk melokalisasikan warung remang-remang tersebut menjadi suatu kawasan khususkarenakeberadaanya yang meresahkan masyarakat. Setelah dilokalisasikan, kawasan lokalisasi Kebobang semakin marakdan mulai dibangunlah beberapa bangunan di kawasan tersebut.

Bukan hanya bangunan yang semakin bertambah, penghuni lokalisasi punsemakin bertambah terutama PSKnyadengan jumlah 90-100 orang. Namun seiring kebijakan Pemerintah Desa, jumlah PSK tidak boleh melebihi angka tersebut. Penurunan PSK justru semakin menyusut sejak tahun 2005 hingga pada saat penutupan lokalisasi serentahyang dilakukan di Jawa Timur, jumlah PSK tinggal hanya 52. Lebih lagi, pasca penutupan jumlah PSK yang tersisa hanya 17 orang saja. Penurunan PSK ini disinyalir karena munculnya warung remang-remang lainnya sehingga lokalisasi Kebobang tersaingi dengan keberadaan tempat-tempat tersebut.

Secara struktur di lokalisasi, masyarakat lokalisasi memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Peran yang dilakukan seperti mucikari, PSK, pedagang, tukang parkir hingga pelanggan memiliki fungsinya masing-masing. Seperti halnya yang dikatakan oleh Pierre Bourdieu bahwa suatu institusi memproduksi pembagian kultur masyarakat dengan berbagai cara kasat mata maupun nampak. Hal ini seakan menguatkan bukti bahwa setiap elemen peran memiliki fungsinya masing-masing untuk membangun dan memberi warna serta perubahan di komunitasnya tersebut. Contoh yang paling nyata adalah, bahwa PSK memiliki fungsi sebagai penarik pelanggan yang dibantu oleh mucikari. Pelanggan sebagai pihak yang datang memberi penghidupan kepada PSK dengan menikmati jasa yang diberikan oleh PSK. Pedagang, tukang parkir hingga buruh cuci menjadi bagian yang tak terpisahkan. Keberadaan mereka memberi fasilitas tambahan bagi pelanggan di samping kegiatan ekonomis yang dilakukan di kawasan lokalisasi tersebut. Kesemuanya menyatu hingga menyadari akan peran dan fungsinya di dalam komunitas tersebut yang saling berkesinambungan.

Selain pada masyarakat internal lokalisasi, ada peran lain yang dilakukan oleh elemen di luar lokalisasi. Seperti halnya peran pemerintah seperti halnya pemerintah Desa hingga pemerintah provinsi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak hingga pihak non pemerintah seperti LSM. Keseluruhan pihak tersebut memiliki

fungsinya masing-masing sebagai contoh Pemerintah Desa memberikan akses untuk dibangunnya kawasan lokalisasi tersebut dan memberikan program sosial bagi penghuni lokalisasi. Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan fasilitas cek kesehatan bagi para PSK untuk memeriksakan kesehatan agar terhindar dari penyakit yang biasa menjangkit PSK seperti HIV/AIDS serta penyakit kelamin. Tugas Dinas Kesehatan selain memberi pengobatan jika PSK terjangkit penyakit, namun juga mendeteksi dini penyakit tersebut agar tidak menular kepada orang lain.

Dari hubungan di atas, keseluruhan peran saling terikat dan memiliki fungsinya masing-masing. Sehingga terciptalah sebuah kultur dan struktur yang saling terkait karena masing-masing peran menginternalisasikan dan mengeksternalisasikan dari pandangan perannya sendiri. Dari sana tercipta dialektika yang menumbuhkan kebudayaan baru serta strukturnya.

### **1. Habitualisasi Wanita Kerja Mandiri**

Banyak alasan bagaimana seseorang akhirnya terjerumus atau bahkan menjerumuskan diri ke prostitusi. Kebanyakan orang yang masuk ke ranah prostitusi dikarenakan persialan ekonomi. Kegagalan dalam melakukan bisnis atau membuat orang mengambil jalan pintas untuk menjadi Perempuan Sek Komersial. Faktor lain seperti sulitnya mendapat pekerjaan yang tidak hanya dialami oleh para lulusan perguruan tinggi, apalagi orang-orang yang hanya mampu

mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah menengah. Hal ini banyak terjadi khususnya di lokasi Kebobang, apalagi mengingat Kebobang merupakan lokasi kecil sehingga para penghuninya merupakan perempuan-perempuan yang tidak memiliki pendidikan tinggi dan keahlian sehingga menjajakan diri di lokasi dengan segala keterbatasannya.

Tidak sedikit para PSK yang terjatuh pada hutang yang menjadi alasan mengapa dirinya harus bekerja di wilayah prostitusi. Banyak dari PSK yang datang ke lokasi dikarenakan tuntutan hutang hasil dari pinjaman hutang dari rentenir dengan bunga yang tinggi. Bukan hanya hutang kepada rentenir, hutang juga dari Bank. Parahnya, mereka tidak paham mengenai bunga Bank sehingga lambat laun hutang tidak dapat terbayarkan sehingga menjadi PSK menjadi satu jalan untuk menyelesaikan pembayaran hutang. Hal ini dilakukan karena mereka beranggapan bahwa menjadi PSK dapat menghasilkan uang dengan waktu yang singkat dan dengan jumlah yang besar.

Selain alasan di atas, lokasi bisa dijadikan sebuah tempat dalam melampiaskan persoalan kehidupan. Beberapa yang akhirnya tinggal di lokasi dengan meninggalkan keluarganya dikarenakan kegagalan membangun rumah tangga. Sehingga melakukan praktik prostitusi sebagai pelampiasan dalam persoalan hidup serta menjadi akses balas dendam terhadap pasangannya. Dendam sosial yang dilampiaskan

oleh PSK tidak hanya dengan dilampiaskan secara langsung, dengan memberitahukan keberadaannya kepada mantan pasangan dapat membuat dirinya puas. Salah satu alasannya karena dengan menunjukkan dirinya sebagai PSK secara tidak tersirat menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat kepuasan dari pasangan yang telah lalu dalam pemenuhan kebutuhan biologis sehingga mencari kepuasan di lokasi.

Sebagai masyarakat yang kurang mendapat sentuhan pendidikan, cara berfikir instan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di depan mata. Seperti halnya keputusan untuk berhutang kepada rentenir yang justru semakin menyulitkan hidup. seperti yang dialami salah satu PSK yang awalnya meminjam hutang kepada 'Bank Tithil' atau semacam rentenir yang banyak ditemui di wilayah pedesaan yang awalnya dipergunakan untuk pengobatan anak. Hal ini justru mengakibatkan semakin melonjaknya bunga yang harus dibayarkan dan semakin sulit untuk melunasi. Sehingga keputusan untuk menjadi PSK muncul karena adanya akses untuk menuju lokasi.

Nampaknya akses ke lokasi yang mudah menjadi semakin maraknya praktik prostitusi dan semakin mengembangkan lokasi. Apalagi dengan keadaan seseorang yang dituntut untuk mendapatkan pendapat yang cepat karena terlilit hutang. Kesempatan untuk bekerja sebagai PSK di lokasi menjadi angin segar bagi mereka yang membutuhkan. Sehingga menempatkan nilai dan

moral masyarakat diurutan kesekian dengan proyeksi permasalahan yang sedang dihadapi perlu penyelesaian sesegera mungkin sebagaimana kutipan wawancara di bawah ini:

Saya itu dulu begini mbak. Waktu itu anak saya sedang sakit. Sudah 4 tahun. Rumah kerjaan hilang semua. Lalu saya ditawari kesini. Awalnya saya tidak tahu kerjanya seperti ini. Tapi lama-kelamaan saya betah juga. Anak saya sakit itu ngentekke duit okeh mbak. Sampe hutang di bank-bank. (Bank titil, temannya menyahut sambil tertawa). Iya bank titil sampai sekarang belum lunas. Wong setelah anak saya sakit 4 tahun tibae ibu saya yang sakit. Yo wes sampai sak iki sugih utang. Wawancara dengan Ibu Mawar (nama disamarkan).

Ketersediaan akses bagi perempuan untuk berkiprah di lokalisasi menjadi penting. Hal ini mengingat bahwa tidak sembarang orang bisa masuk ke ranah ini mengingat nilai-nilai sosial menganggap rendah dunia prostitusi. Seiring dengan mudahnya akses maka banyak pula orang yang rela masuk ke dalam lingkaran prostitusi. Orang-orang yang akhirnya menjadi pekerja seks komersil di lokalisasi banyak disebabkan faktor ekonomi. Ketika sudah terdesak secara ekonomi, maka orang-orang akan mudah terjaring. Seperti halnya pengakuan di atas bahwa hal yang membuat dirinya masuk dalam jaringan prostitusi adalah dikarenakan desakan untuk membayar hutang sehingga ketika ada pihak yang menjanjikan mendapatkan pendapatan secara cepat akhirnya terpengaruh dan mengikutinya.

Setelah berhasil masuk dalam bisnis prostitusi, pendapatan mulai membaik yang didapatkan secara cepat. Dari sini mulai tumbuh dalam diri pekerja seks komersil perasaan

nyaman dengan pekerjaannya. Secara perlahan mengetahui struktur sosial dan ranah yang didiami serta melakoni perannya masing-masing. Dari peran inilah maka tumbuh habituasi yang semakin hari semakin melekat dan sulit dihilangkan. Habituasi inilah yang membuat pemberdayaan sulit sekali terlaksana dengan baik karena memang tidak mudah menghilangkannya.

Ketika pemberdayaan dilakukan kepada para pelaku ini, dibutuhkan proses yang tidak sebentar dan program yang benar-benar matang. Seperti halnya program pemberdayaan yang dilakukan pasca penutupan lokalisasi di Kebobang, Malang ini dimana pemerintah selain melakukan sosialisasi dan pembekalan skill pada PSK juga diberikan uang untuk mereka membangun bisnisnya. Hal ini dilakukan agar PSK tidak lagi bekerja di lokalisasi namun mampu untuk segera membangun kehidupan baru. Namun, setelah peneliti datang ke lokalisasi yang sudah ditutup itu, para PSK masih melakukan transaksi dengan pelanggan meski tidak sebebaskan dulu sebelum lokalisasi ditutup. Hal ini ditandai dengan menurunnya pendapatan PSK seperti di bawah ini:

Paling ya 1 juta. Itu juga susah. Sudah sepi. 5 hari paling sekali melayani. Sekarang iku berubah 90 derajat wes. Lokalisasi dibiarkan sepi. (Wawancara dengan Bu Bunga. WKM).

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa pendapatan para PSK menurun pasca penutupan lokalisasi. Konsekuensi dari penutupan lokalisasi memang berdampak pada



faktor ekonomi yang langsung dirasakan para penghuni. Namun, hal ini tidak merubah niat para PSK untuk tetap bekerja sebagai wanita penghibur karena memang peran yang dijalankannya. Bukan perkara mudah menjadi menjalani peran lainnya dan berpindah pada ranah yang berbeda. Ranah yang dimaksud adalah tempat kerja dan profesi baru.

## 2. Proses Pemberdayaan

Penutupan lokalisasi di Kebobang adalah sebuah mimpi buruk bagi semua orang yang bergantung pada bisnis ini. Bertahun-tahun orang-orang mulai hidup dan melakukan berbagai usaha ekonomi. Mulai dari mucikari yang memiliki wisma yang menjadi tempat tinggal para PSK, Para perempuan penghibur sebagai motor penggerak kehidupan lokalisasi, pedagang yang menjajakan dagangan di area lokalisasi hingga tukang parkir dan preman yang menjanjikan keamanan di kawasan itu. Dari kesemuanya ini bergantung pada banyaknya pendatang yang melakukan transaksi seksual. Sehingga surat mengenai penutupan lokalisasi yang dikeluarkan oleh gubernur Jawa Timur itu seakan menjadi mimpi buruk bagi semua elemen yang mencari nafkah di Kebobang terutama yang usahanya ditopang dari keberadaan lokalisasi.

Resistensi mewarnai penutupan lokalisasi, namun ini sudah menjadi hal yang lumrah karena setiap kebijakan tidak mungkin diterima oleh semua pihak terutama pihak yang merasa dirugikan. Banyak tuntutan yang dilontarkan dan menjadi catatan bagi

pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan bagi masyarakat lokalisasi.

Pemerintah Kabupaten Malang memberikan program sosialisasi yang juga melibatkan mucikari dalam proses pemberdayaan dengan pendekatan secara persuasif. Pemerintah menyadari bahwa memang tidak mudah menutup lokalisasi yang menjadi sandaran ekonomi masyarakat banyak. Namun dengan menggandeng mucikari sosialisasi dapat berjalan. Pendekatan ini dilakukan guna meredam resistensi dan sebagai langkah awal penentuan program dan kebijakan setelahnya.

Program yang dilakukan oleh Dinas Sosial banyak. Ada pelatihan pengolahan pangan seperti membuat Kripik, Telur Asin, Kue, aksesoris, Molto. Dan banyak lagi mbak. Ada, seperti program penguatan mental, rohani dan motivasi untuk para eks PSK. Penutupan lokalisasi juga melibatkan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi. Sasarannya Eks PSK. Tujuannya agar tidak kembali lagi menjadi PSK. (Wawancara dengan Ibu Retno Tri Damayanti, Dinas Sosial Kabupaten Malang).

Program pemberdayaan ini melibatkan banyak elemen pemerintahan seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga kerja dan dinas koperasi serta dinas perindustrian dan perdagangan. Kesemuanya memiliki peran yang berbeda namun memiliki garis koordinatif. Dinas sosial memberikan pelatihan seperti pelatihan pembuatan kue dan jajanan yang untuk mempersiapkan PSK agar bisa bertahan hidup selepas tidak menjadi PSK lagi. Selain itu Dinas Sosial juga memberikan pesangon kepada PSK sebagai modal membangun usaha dan

biaya pulang ke kampung halaman. Namun sebelum PSK meninggalkan lokasi terlebih dahulu menjalani tes kesehatan agar memastikan PSK pulang dalam keadaan sehat dan tidak membawa penyakit menular. Dinas Tenaga Kerja juga memberikan bantuan informasi kepada PSK jika ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan PSK. Dinas Koperasi juga memberikan pelatihan dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh PSK selepas menjalani pelatihan. Selain pihak-pihak di atas program ini juga menggandeng Satpo PP guna mengamankan prosesi penutupan lokasi serta sebagai pengawas untuk memastikan tidak ada lagi praktik prostitusi di Kebobang. Dengan koordinasi ini Pemerintah yakin prostitusi akan berhasil ditutup.

Dari sini nampak upaya pemerintahan untuk memberikan pelatihan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan bekal kepada PSK agar bersiap memiliki pekerjaan lainnya dan tidak kembali menjadi bagian dari bisnis prostitusi. Kegiatan ini merupakan hasil konsolidasi dari beberapa dinas yang ada di Kabupaten Malang dalam menyikapi penutupan lokasi sehingga dapat memaksimalkan program. Pelatihan memang sudah lama dilakukan oleh dinas kepada para PSK seperti pada wawancara berikut:

Sudah lama. Dari tahun 2013 hingga sampai sekarang. Tahun 2013 itu kami sudah sering melakukan pelatihan. Tahun 2011 melakukan pelatihan membuat aksesoris. Iya, kami menasar usia produktif. Umumnya kan usia produktif sampai 45. Tapi kami sampai 50 tahun.

(Wawancara dengan Ibu Retno Tri Damayanti, Dinas Sosial Kabupaten Malang).

Berlangsungnya program ini dapat menunjukkan bahwa pemberdayaan memang sudah dilakukan, namun memang hanya menyentuh pada program yang sifatnya skill dan selanjutnya dibutuhkan semangat oleh para PSK sendiri untuk merubah nasib hidupnya. Program ini dianggap penting bagi PSK agar mulai berfikir merubah sumber usaha dengan mengalokasikan pikiran dan tenaga pada pekerjaan yang lebih produktif dan bisa menjadi jembatan untuk keluar dari lingkaran prostitusi. Namun nampaknya program ini tidak diimbangi dengan minat para PSK untuk setidaknya mencoba mempraktekkan hasil pelatihan untuk pengembangan diri dan sumber penghasilan. Seperti wawancara berikut ini:

Sebenarnya, mereka sebenarnya terpaksa mengikuti. Karena ini adalah aturan atau kebijakan yang sebenarnya tidak mereka kehendaki. Tapi karena ada hadiah atau diberikan uang diakhir kegiatan makanya mereka mengikuti acara ini. (Wawancara dengan Ibu Retno Tri Damayanti, Dinas Sosial Kabupaten Malang).

Hal ini jelas menunjukkan bahwa antusiasme para PSK tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah. Hasil yang didapat dari kegiatan pelatihan ini tidak maksimal karena para PSK yang menjadi fokus kegiatan tidak terlalu menyukai kegiatan tersebut. Hal ini senada dengan pengakuan PSK bahwa ada hal lain yang dicari dalam pelatihan ini seperti pernyataan salah satu PSK di lokasi Kebobang:

Seneng mbak. Yo seneng mbak oleh duit.heeee (Wawancara dengan Bunga, PSK di Lokalisasi Kebobang).

Pemberian uang transport bagi PSK yang mendapatkan pelatihan menjadi salah satu daya tarik bagi PSK. Hal inilah yang membuat PSK datang dan mengikti. Ketika motivasinya berbeda dengan visi dan misi pelatihan, maka jelas program ini hanya top down dan tidak sesuai dengan keinginan para PSK. Bukan perkara mudah emmang mengubah motivasi hidup bagi orang yang kecenderunagn akan falsafah hidup sudah tidak sejalan dengan nilai dan norma. Di sisi lain, Pemberdayaan ini bukan hanya diberikan kepada PSk saja, namun juga warga yang terdampak penutupan lokaloisasi seperti pedanag, jasa laundry hingga tukang parkir. Namun hal senada juga disampaikan kepada penulis tentang tanggapan prosesi pemberdayaan yang menurut mereka tidaklah sesuai dengan ekspektasi. Seperti yang disampaikan oleh narasumber di bawah ini:

*Alah wong mung diajari koyo seminar-seminar saja. Kita itu butuh praktek. Bukan cuman mendengarkan seminar. Lagi pula itu yang ada di lokalisasi percuma dikasih program ini itu. Opo iku disuruh buat roti. Gak bakal dilakukan. wong mereka mikirnya itu besok bisa makan opo gak kok. Lagi pula masih biayain anak. Ada yang di SMP ada yang di SMA malah saya baru kaget kalau ada yang anaknya di An Nur (nama pondok pesantren). La kalau seminar, bisa makan apa besok anak-anaknya itu. Makanya saya ndak ikut. Percuma. Coba mereka iku suruh kerjo. Mending gitu dari pada kok disuruh seminar-seminar. (Wawancara dengan Pak Yanto, Pedagang di Lokalisasi).*

Cuman diajari seperti seminar-seminar saja. kita itu butuh praktek. Bukan hanya mendengarkan seminar. Lagi pula itu yang ada di lokalisasi percuma dikasih program ini itu. Apa itu disuruh membuat roti? Tidak mungkin

dilakukan karena mereka memikirkan besok bisa makan atau tidak. Lagipula masih biayai anak. Ada yang di SMP. Ada yang di SMA. Malah saya baru tahu dan kaget kalau ada yang anaknya di An Nur. Sedangkan kalau seminar mereka bisa makan apa untuk anak-anaknya? Oleh karena itu saya tidak ikut. Percuma., coba kalau mereka itu disuruh bekerja. Lebih baik begitu dari pada disuruh seminar-seminar. (Wawancara dengan Pak Yanto, Pedagang di Lokalisasi).

Perbedaan cara pandang inilah yang membuat proses pemberdayaan tidaklah maksimal. Jika masyarakat lebih kepada cara singkat dalam mendapatkan penghasilan yang nampak, pemerintah memandang bahwa kepemilikan modal skill adalah penting untuk membekali PSK dan para terdampak penutupan untuk mampu bersaing dengan masyarakat lainnya. Penting adanya penyatuan cara pandang bagi kedua belah pihak agar merumuskan program dan keinginan sesuai dengan tujuan bersama.

Oleh karenanya, faktor ekonomi bukan satu-satunya permasalahan yang dihadapi dalam menyikapi persoalan mengenai PSK. Faktor motivasi diri dan kesadaran dari habituasinya inilah yang penting untuk emnumbuhkan semangat PSK dalam membangun motivasi diri dan hidup lebih baik dengan penghasilan yang lebih baik juga. Pelatihan mental pun dilakuakn oleh pemerintah. Seperti pada pernyataan berikut

Ada, seperti program penguatan mental, rohani dan motivasi untuk para eks PSK. Penutupan lokalisasi juga melibatkan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perinsudtrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi. (Wawancara dengan Retno Tri Damayanti, Dinas Sosial Kabupaten Malang)

Program penyadaran ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri bagi PSK, namun semata-mata strukturalisme simbolik tidak berlaku pada kasus seperti ini. Ketika program dan stimulus telah dilakukan namun obyek tidak merasa penting dan mengikutinya, maka perlu dilihat faktor yang lebih personal dengan melihat fenomena ini dengan pandangan fenomenologi. Pemahaman ini dilihat dari seberapa besar kepedulian PSK akan dirinya sendiri dan masa depannya. Hal ini dilihat dari motivasi dirinya dalam merubah hidup ke dalam kehidupan yang lebih baik dengan cara merubah pandangan hidup dan dapat bekerja lebih giat di ranah yang berbeda. Karena program pemberdayaan bukan hanya mengenai program apa yang paling baik untuk diberikan kepada obyek dalam hal ini PSK namun hubungan kedua belah pihak untuk memberdayakan dan mau diberdayakan. Hal ini sulit jika program dilakukan secara bottom up tanpa melibatkan perencanaan yang juga melibatkan obyek. Karena belum tentu program yang diberikan pemerintah adalah jawaban dari kebutuhan mendasar oleh PSK. Inilah yang kemudian menjadi penting bagaimana PSK dan pihak yang terkait duduk bersama membicarakan program dengan sebelumnya melakukan perumusan bersama.

### **3. Perubahan Sosial Kehidupan Perempuan Seks Komersil Pasca Penutupan Lokalisasi**

Membicarakan lokalisasi yang sudah ditutup oleh pemerintah, bayangan orang-orang

mungkin menganggap bahwa urusan sudah selesai dan struktur serta nilai sosial berjalan secara normal selayaknya tempat lain. Namun, membicarakan tentang lokalisasi tidak semudah itu. Konstruksi sosial yang telah terbangun di lokalisasi memang tidak mudah berganti begitu saja hanya dengan menutup lokalisasi. Perlu adanya proses panjang untuk recovery atau mengubah tempat tersebut dan mengganti sistem sosialnya.

Secara personal, Kehidupan PSK ataupun masyarakat terdampak memiliki ceritanya masing-masing. Seperti yang terjadi pada salah satu PSK yang telah meninggalkan lokalisasi. Alasannya bukan karena telah ditutupnya lokalisasi, namun karena dirinya telah mengidap AIDS yang mau tidak mau harus berhenti bekerja sebagai PSK. Seperti penuturan salahsatu informan di bawah ini:

Saya meninggalkan lokalisasi sudah lebih setahun yang lalu. Saya gak ngerasain dampaknya. Saya sih gak sepakat (kalau lokalisasi ditutup). Tapi kalau ini baik buat semuanya ya pemerintah harus ngasih yang PSK butuhkan lah mbak. Harapannya bahwa pemerintah bisa memberikan pekerjaan bagi PSK untuk terus bertahan hidup setelah di tutup lokalisasi. Saya senang dengan pemerintah memberi uang modal untuk membantu PSK membangun usaha baru dengan membarikan modal untuk usaha. (Wawancara dengan Melati, mantan PSK Kebobang).

Dari jawaban ini memang keterikatan dengan dunia prostitusi memang kuat. Sehari-hari disajikan dengan konstruksi dan perspektif yang menganggap bahwa dunia prostitusi adalah dunia yang mereka yakini terbaik untuk dijalani. Bahkan ketika penutupan dilakukan perspektif mereka pun masih sama bahwa harus ada

keuntungan yang didapat dan kepentingan mereka tercapai bagaimanapun hasilnya. Seperti halnya ketika akan dilakukan pemberdayaan. Hal yang ingin didapatkan adalah pekerjaan baru yang dapat menguntungkan mereka. Tidak perlu mencari pelanggan namun lebih pada ketersediaan gaji secara rutin untuk bertahan hidup. Sikap ini mencerminkan bahwa PSK yang merasa nyaman dengan pekerjaan PSKnya menolak untuk bersusah payah bekerja.

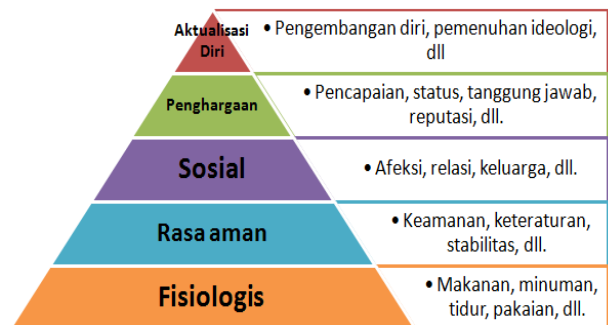
Seandainya bukan karena penyakit yang menggerogoti PSK ini, akan memungkinkan bahwa pekerjaan sebagai PSK akan diteruskan. Hal ini nyata bahwa pekerjaan menjadi PSK tidak membutuhkan tenaga kasar untuk dilakukan pun juga pelanggan datang sendiri. Kemungkinan ini yang melenakan PSK untuk tidak bangkit dan mencari pendapat lain yang lebih baik menurut nilai dan norma masyarakat.

Ada banyak alasan kenapa lokalisasi sekana menjadi rumah bagi banyak orang yang bergantung. Kepemilikan peran menjadi salah satunya. Banyak orang yang sudah menyatu pada struktur masyarakat tersebut dan merasa nyaman sehingga tidak ingin pergi apalagi untuk memperbaiki diri dan reputasi. Lokalisasi adalah rumah bagi orang yang tidak diterima di tempat lain dan menjadi pilihan yang umum dilakukan seperti salah satu PSK yang diwawancarai mengapa kembali lagi ke lokalisasi meski sudah ditutup.

(enak, sahut temannya). Ya karena tidak ada kerjaan lain. Dulu itu saya disini gara-gara suami meninggal. Lalu menikah lagi terus saya ikut suami ke Kalimantan. Terus balik ke sini lagi. Suami pergi ke Kalimantan lagi. Ya saya ditinggal lagi.

Ya sudah, saya balik ke sini lagi. (Wawancara dengan Dahlia, PSK kebobang).

Setiap orang memiliki kisah hidupnya masing-masing. Seperti halnya Dahlia yang memutuskan kembali lagi karena tidak menemukan tempat yang lebih baik. Lokalisasi adalah rumah bagi mereka yang tidak menemukan peran di tempat baru. Sehingga kembali ke lokalisasi adalah jawaban dari setiap permasalahan. Ketika sudah merasa nyaman di lokalisasi, sulit untuk berpindah kecuali ada hal-hal yang memaksa atau menemukan tempat yang lebih layak. Sebagaimana teori kebutuhan yang disampaikan oleh Maslow bahwa manusia akan mencari sesuai yang dapat memenuhi kebutuhannya.



Gambar. Hierarki Kebutuhan Maslow

Dari sini nampak bahwa PSK secara teori kebutuhan masih memikirkan tahap fisiologi selepas penutupan lokalisasi. Kecenderungan untuk mencari nafkah untuk bertahan hidup mencari acuan awal. Hal inilah yang kemudian tidak didapat dari hanya sekedar pelatihan dan pemahaman retorika dalam seminar yang mereka ikuti. Masyarakat yang belum mampu berdiri pada tahap fisiologi cenderung berfikir instan dan menjadikan faktor

fisiologis menjadi hal yang paling penting untuk dipenuhi. Ketika tempat lain tidak mampu memenuhi faktor ini, maka hal yang paling umum dilakukan adalah mencari tempat yang dapat memenuhi kebutuhan ini. Salah satu tujuannya adalah kembali lagi ke lokalisasi karena sejarah masalah lalu lokalisasi yang dapat diandalkan untuk pemenuhan faktor fisiologis ini.

Setelah penutupan lokalisasi, sebagian PSK yang bertahan tentunya mengalami perubahan-perubahan. Salah satu dampak yang sangat dirasakan adalah faktor ekonomi dengan penghasilan yang tidak menentu dikarenakan semakin minimnya pelanggan yang datang. Jika penghasilan yang didapat oleh salah satu informan sebelum penutupan bisa mencapai 2,5 juta dalam satu bulan, pasca penutupan penghasilan turun menjadi 700 ribu. Seperti yang dikatakan pada saat wawancara berikut ini:

Kalau dulu pas masih rame mbak, 2 jutaan lah. Kalau sedang ramai ya 2,5 juta sekarang. (Sekarang) Paling 700 mbak. Iku jug awes dikurangi kontrakan sebulan 500. (Wawancara dengan Lily, PSK Kebobang)

Dengan pendapatan yang menurun dirinya masih bertahan. Disamping karena memang tidak ada pilihan lain, hal ini juga disebabkan karena peran yang sudah terlanjur melekat dalam dirinya. Pekerjaan yang sudah melekat dan keahlian yang dimiliki mendukung dirinya dalam dunia yang sudah digeluti selama ini menjadikan dirinya merasa lokalisasi adalah tempat yang paling baik untuk bertahan hidup

dengan struktur dan nilai yang sudah dipahaminya.

Setelah Fisiologis telah tercapai, maka hal yang penting adalah rasa aman. Di lokalisasi Kebobang, meski sudah ditutup namun wilayah lokalisasi tidak nampak adanya pengawasan yang mencolok. Satpol PP akan datang untuk mengawasi jika ada perintah saja. Selebihnya, setelah penutupan keadaan tetap biasa seperti hari-hari biasa. Namun keadaan lebih sepi karena pedagang sudah tidak nampak berjualan di lokalisasi dan pelanggan merasa bahwa lokalisasi sudah tutup sehingga tidak ada aktivitas yang berarti di lokalisasi Kebobang.

Selain itu, Fasilitas kesehatan pun sudah tidak lagi diadakan. Hal ini menjadi konsekuensi bahwa lokalisasi ditutup juga menutup fasilitas yang dapat diakses oleh penghuni lokalisasi. Hal ini tidak menjadi masalah besar mengingat kesadaran akan kesehatan minim bagi PSK di lokalisasi Kebobang ini. Seperti penuturan salah satu mucikari berikut ini:

Oh ada. Sudah clear. Dulu kan kita punya jaringan. Ada yang namanya Pokja, la itu kana da kebijakan lokal, ada kebijakan forum kan ada si? Kebijakan lokal seperti di sini itu ada peraturan yang mewajibkan mbak-mbaknya periksa setiap bulan. Kalau tidak periksa akan kena sanksi. Bahkan ada jaringan ketika mereka dikeluarkan dari sini dengan alasan kesehatan bahkan dia tidak bisa diterima di lokalisasi yang masih satu forum sak Kabupaten. La itu kan jaringan-jaringan yang sudah dibentuk, kemudian juga ada bentuk-bentuk pelatihan dari Dinas atau dari mana untuk mbak-mbake untuk mengurangi aktivitas mereka agar mereka bisa mandiri. Memang memberikan penyadaran kepada mereka itu tidak mudah dan memerlukan waktu. Wong saya menyadarkan mereka agar suntik kesehatan saja saya butuh waktu 3 kok apalagi alih profesi. Paling tidak ya butuh waktu sampai

3 tahun untuk pendampingan. (Wawancara dengan Bagong, Mucikari Lokalisasi Kebobang).

Dari keseluruhan rangkaian program pemberdayaan dan proses penutupan yang dilakukan di lokalisasi Kebobang ini jelas ada beberapa hal sektor yang menjadi sorotan pasca penutupan lokalisasi. Namun faktor ekonomi merupakan hal yang paling terdampak yang dirasakan bagi warga yang bergantung dari adanya lokalisasi ini. Nampak dari pendapatan yang menurun dan menjadikan banyak dari anggota yang akhirnya berpindah tempat atau pulang ke kampung halaman. Keadaan ini tentunya akan berubah seiring perjalanan waktu dan pergerakan dari masing-masing pihak baik pihak internal seperti PSK, mucikari hingga para pedagang serta pihak eksternal seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki akses dalam keberadaan lokalisasi ini.

## **E. Kesimpulan**

Perjalanan dari sebuah lokalisasi memiliki sejarah yang panjang, seperti halnya lokalisasi Kebobang yang merupakan salah satu lokalisasi di Kabupaten Malang yang telah ditutup. Namun, pasca penutupan tidak kemudian menjadikan lokalisasi ini mati dan tidak ada pergerakan sama sekali. Meski banyak program pemberdayaan yang dilakukan namun nadi lokalisasi tidak lantas berhenti. Ada sisa-sisa kejayaan yang masih menjadikan lokalisasi Kebobang tetap beroperasi dengan segala

keterbatasan dan cerita masing-masing penghuninya.

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi penutupan lokalisasi ini telah dijalankan. Mulai dari pelatihan pembuatan kue, pembuatan aksesoris dan program-program peningkatan skill yang lain hingga pemberian uang pesangon setidaknya memberikan ruang bagi sebagian PSK untuk berkiprah di dunia lain dan keluar dari lokalisasi Kebobang. Meski tidak bisa dikatakan program pemerintah mampu mengakomodir segala kebutuhan PSK dan warga terdampak penutupan lainnya. Seperti nampak bahwa banyak PSK yang masih bertahan meski lokalisasi sudah ditutup.

Setidaknya ada 3 hal yang berbeda dari penutupan lokalisasi ini. Yang pertama dan yang paling menjadi sorotan adalah faktor ekonomi dimana pendapatan PSK menurun drastis pasca penutupan lokalisasi diakibatkan pelanggan yang biasa menggunakan jasa PSK enggan datang lagi ke lokalisasi. Selain itu, fasilitas kesehatan juga tidak disediakan menyusul penutupan lokalisasi yang dianggap ditutup pula fasilitas bagi para PSK. Terakhir adalah sisi keamanan dimana masih ada pengawasan dari Satpol PP yang beberapa kali masih mengawasi lokalisasi tersebut. Meski tidak intens didatangi oleh Satpol PP, orang-orang mengaggap bahwa lokalisasi itu telah menjadi lokasi yang tidak boleh sembarang orang masuk dan melakukan transaksi seksual lagi. Hal inilah salah satu alasan mengapa para

pelanggan lokalisasi enggan untuk datang kembali menikmati jasa para PSK di lokalisasi Kebobang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. (2012). Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu. *eJournal Biokultur*.
- Daulay, P. (2018). Post-Closure Prostitution and The Adaptation Strategy of Sex Workers: Case Study of Dolly Prostitution Community, Surabaya. *International Journal of West Asian Studies*, 10(1), 13-22.
- Handayani, T. D. (2014, Desember). Dolly Riwayatmu Kini. *Humaniora*, 11(2), 57-65.
- Kenrick, D. T., Griskevicius, V., Neuberg, S. L., & Schaller, M. (2010). Renovating the Pyramid of Needs: Contemporary Extensions Built Upon Ancient Foundations. *Sage Journals*, 292-314.
- Surya. (2014). *Tujuh Lokalisasi di Kabupaten Malang Ditutup November*. Malang: Tribun News.
- Wisadirana, D., & Hakim, L. (2015). *Perlawanan Sosial Masyarakat Lokalisasi Atas Kebijakan Pemerintah*. Malang: Intelensia Media.
- Wisadirana, D., & Hakim, L. (2015). *Perlawanan Sosial Masyarakat Lokalisasi Atas Kebijakan Pemerintah*. Malang: Intelensia Media.